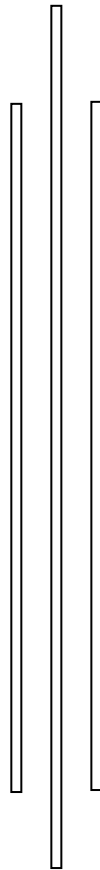




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KANTOR KECAMATAN UDANAWU
TAHUN ANGGARAN 2018
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2018

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab.....	...
Laporan Realisasi Anggaran.....	...
Neraca
Laporan Operasional.....	...
Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB I Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	...
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	...
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	...
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	...
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan.....	...
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..	...
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	...

5.1	Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.1.1	Pendapatan – LRA
5.1.2	Belanja.....	...
5.1.3	Transfer
5.1.4	Pembiayaan
5.1.5	Pendapatan – LO
5.1.6	Beban.....	...
5.1.7	Aset
5.1.8	Kewajiban
5.1.9	Ekuitas Dana
-	BAB VIINFORMASI TAMBAHAN
	Lampiran – lampiran

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Udanawu yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, 31 Desember 2018

CAMAT UDANAWU

SAMSUL MA'ARIF,SH,MSi

Pembina Tk.I

Nip : 19610710 198903 1 010

KANTOR KECAMTAN UDANAWU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
- 2) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018. Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan dengan pilihan program dan kegiatan dikosongkan (untuk laporan belanja langsung dan tidak langsung) per 31 Desember 2018
- 3) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan (per 31 Desember 2018).

KANTOR KECAMATAN UDANAWU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

KANTOR KECAMATAN UDANAWU
LAPORAN OPERASIONAL
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2018

KANTOR KECAMATAN UDANAWU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KANTOR KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan tahun 2018 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2018 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 0,00 mencapai 0 % dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.791.716.590,00 atau mencapai 98,94 % dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2018 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.516.644.218,57, yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp.986.000,00, investasi jangka panjang sebesar Rp.0,00, aset tetap sebesar Rp.509.078.218,57, dana cadangan Rp.0,00 dan aset lainnya sebesar Rp.6.580.000,00.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.370.574,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 370.574,00, dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp.0,00

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.516.273.644,57.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit.

Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp.0,00, Beban dari kegiatan Operasional Rp.(1.847.960.357,00) dan surplus/defisit sebesar Rp.(1.847.960.357,00)

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas awal sebesar Rp.572.084.411,57, Surplus/Defisit Rp.(1.847.960.357,00) dan Ekuitas akhir sebesar Rp.516.273.644,57.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 109 tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A);
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015 Nomor 1/C);
30. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 6/B);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan

- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 1/C);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 9/A);
 34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/B);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 5/E);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 10/A) ;
 37. Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 61/A);
 38. Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 40/A).

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;.

- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2018, Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar mempunyai 5 (lima) program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
- d. Program Perencanaan, Penganggaran, pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- e. Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- f. Program Pelayanan Kecamatan;

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 secara keseluruhan sebesar Rp .1.810.843.106,00, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Belanja Operasi (sesuai di Laporan Simda)	1.774.843.106,00
2.	Belanja Modal (sesuai di Laporan Simda)	36.000.000,00
	Surplus/(Defisit)	(1.810.843.106,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018 Nomor 10 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.810.843.106,00 terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp.36.000.000,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar selama tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1.	Belanja	1.810.843.106,00	1.791.716.590,00	98,94
	- <i>Belanja Operasi</i>	1.774.843.106,00	1.755.716.590,00	98,92
	- <i>Belanja Modal</i>	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
	Total Belanja	(1.810.843.106,00)	(1.791.716.590,00)	98,94

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp. 1.791.716.590,00 atau 98,94 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.19.126.516,00 atau 1,06 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	1.455.724.150,00	1.439.918.084,00	98,91

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
2	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	122.858.956,00	121.823.906,00	99,16
3	Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79.600.000,00	78.775.100,00	98,96
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.750.000,00	15.490.000,00	92,48
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	3.350.000,00	3.350.000,00	100,00
6	Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
7	Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah	2.925.000,00	2.925.000,00	100,00
8	Fasilitasi dan Pembinaan Adminitrasi Desa/Kelurahan	66.650.000,00	66.649.500,00	100,00
9	Fasiitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah	10.925.000,00	10.925.000,00	100,00
10	Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Katrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00
11	Fasiitasi Pembinaan dan Monev Ekonomi, Soaial, Budaya dan Keagamaan	17.300.000,00	17.300.000,00	100,00
12	Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00
13	Fasiitasi Penerbitan Layanan Perijinan	4.760.000,00	4.560.000,00	95,80
	Total	355.118.955,00	351.798.506,00	99,06

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- c. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- d. Karena adanya Perubahan Rencana Kerja Sehingga mempengaruhi Pelaksanaan pengelolaan Adminitrasi Keuangan yang ada di SKPD;
- e. Sering terjadinya Keterlambatan Pengajuan Realisasi Anggaran;

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas serta pendapatan-lo dan beban.

1. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan

b. Belanja-LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan

pertambahan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) **Gedungan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan

konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

g. Pendapatan LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

h. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 tahun 2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar. Selain itu, Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Blitar nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
a. Aset	516.644.218,57	573.051.979,57

Saldo Aset Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 516.644.218,57 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
(1)	Aset Lancar	986.000,00	828.500,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	509.078.218,57	565.643.479,57
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	6.580.000,00	6.580.000,00
Jumlah Aset		516.644.218,57	573.051.979,57

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
1) Aset Lancar	986.000,00	828.500,00

Saldo Aset Lancar Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar per 31 Desember 2018 sebesar 986.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
(a)	Kas	0,00	0,00
(b)	Piutang Retribusi	0,00	0,00
(c)	Piutang lain-lain	0,00	0,00
(d)	Persediaan	986.000,00	828.500,00
Jumlah		986.000,00	828.500,00

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
(a) Kas	0,00	0,00

Saldo Kas Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
(b) Piutang Retribusi	0,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 terdiri dari ... dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	0,00
2	0,00
3	0,00
Jumlah		0,00

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
(c) Piutang lain-lain	0,00	0,00

Saldo piutang lain-lain Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	0,00
2	0,00
3	0,00
Jumlah		0,00

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
(d) Persediaan	986.000,00	828.500,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 986.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	986.000,00
(2)	Alat listrik	0,00
(3)		0,00
(4)		0,00
(5)		0,00
(6)		0,00
(7)		0,00
(8)		0,00
(9)		0,00
(10)		0,00
(11)		0,00
(12)		0,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
(13)		0,00
(14)		0,00
(15)		0,00
(16)		0,00
(17)		0,00
(18)		0,00
	Jumlah	986.000,00

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
2) Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Investasi jangka Panjang Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar per 31 Desember 2018 sebesar nihil.

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
3) Aset Tetap	509.078.218,57	565.643.479,57

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar per 31 Desember 2017 sebesar Rp.509.078.218,57 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 565.643.479,57 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
(a)	Tanah	164.160.000,00	164.160.000,00
(b)	Peralatan dan Mesin	771.440.625,00	735.440.625,00
(c)	Gedung dan Bangunan	332.026.700,00	332.026.700,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28.400.000,00	28.400.000,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(786.949.106,43)	(694.383.845,43)
	Jumlah Aset	509.078.218,57	565.643.479,57

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2018 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2017 (Rp0,00-Rp0,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
(a) Tanah	164.160.000,00	164.160.000,00

Saldo Tanah Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 164.160.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2018 164.160.000,00

Penambahan Aset Tetap Tanah

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal		
Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi		+
Jumlah penambahan	<hr/>	
Pengurangan Aset Tetap Tanah		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan	<hr/>	(.....0,00.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2018		164.160.000,00

Koreksi tambah aset tetap tanah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	
-	
-	
-	
-	+
Total Koreksi Tambah	<hr/>0,00.....

Koreksi kurang aset tetap tanah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)
-	(.....)
-	(.....)

-	(.....)	
-	(.....) +	
Total Koreksi Kurang		(...0,00.....)

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	771.440.625,00	735.440.625,00

Saldo peralatan dan mesin Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 771.440.625,00 dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada (*lampiran mutasi asset tetap 2018*)

Saldo Awal Per 1 Januari 2018 **735.440.625,00**

Penambahan Peralatan dan Mesin

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal	36.000.000,00	
Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi		+
Jumlah penambahan	36.000.000,00	

Pengurangan Peralatan dan Mesin

Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....) +	
Jumlah Pengurangan		(.....) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2018 **771.440.625,00**

Koreksi tambah asset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

-

-	
-	
-	
-	+
	<hr/>	
Total Koreksi Tambah		(.....0,00.....)

Koreksi kurang asset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
	<hr/>	
Total Koreksi Kurang		(...0,00.....)

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	332.026.700,00	332.026.700,00

Saldo gedung dan bangunan Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 332.026.700,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2018 332.026.700,00

Penambahan Gedung dan Bangunan

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi

Jumlah penambahan

0,00

0,00

Pengurangan Gedung dan Bangunan

0,00

Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....) +	
Jumlah Pengurangan		(.....0,00.....) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2018		332.026.700,00

Koreksi tambah asset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.0,00... dengan rincian sebagai berikut:

-	
-	
-	
-	
- +	
Total Koreksi Tambah		...0,00.....

Koreksi kurang asset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....) +	
Total Koreksi Kurang		(...0,00.....)

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	28.400.000,00	28.400.000,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitarper 31 Desember 2018 sebesar Rp.28.400.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2018	28.400.000,00
--------------------------------------	----------------------

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal		
Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi	0,00	+
Jumlah penambahan	0,00	0,00

Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan	(.....0,00.....)	+
Saldo Akhir Per 31 Desember 2018	28.400.000,00	

Koreksi tambah asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.0,00... dengan rincian sebagai berikut:

-	
-	
-	
-	
-	+
Total Koreksi Tambah	(.....0,00.....)	

Koreksi kurang asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.0,00... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)
-	(.....)

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....) +	
Total Koreksi Kurang		(.....0,00.....)

	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2017</u> <u>(Rp)</u>
(e) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2018 **0,00**

Penambahan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi 0,00 +

Jumlah penambahan **0,00** **0,00**

Pengurangan Aset Tetap Lainnya **0,00**

Penghapusan (.....)

Mutasi (.....)

Hibah (.....)

Reklasifikasi (.....)

Koreksi (.....) +

Jumlah Pengurangan **(.....0,0.....) +**

Saldo Akhir Per 31 Desember 2018

Koreksi tambah asset tetap Lainnya sebesar Rp...0,00... dengan rincian sebagai berikut:

-	
-	
-	
-	
-	
-	+
Total Koreksi Tambah	0,00.....

Koreksi kurang asset tetap Lainnya sebesar Rp...0,00... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
Total Koreksi Kurang		(.....0,00.....)

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KONSTRUKSI	Nomor Kontrak	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Misal:Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2				
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
(g) Akumulasi Penyusutan	(786.949.106,43)	(694.383.845,43)

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar (Rp.786.949.106,43)dengan rincian sebagai berikut:

NO	Akun	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	<i>Peralatan Dan Mesin</i>	(568.916.795,43)	(483.894.180,43,)
3	<i>Gedung dan Bangunan</i>	(213.396.200,00)	(206.573.000,00)
2	<i>Jalan, Jaringan dan Irigasi</i>	(4.636.111,00)	(3.916.665,00)
	JUMLAH	(786.949.106,43)	(694.383.845,43)

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Awal Per 1 Januari 2018 (694.383.845,43)

Penambahan Akumulasi penyusutan

Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (85.022.615,00)

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan (6.823.200,00)

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi (719.446,00) +

(92.565.261)

Reklasifikasi

Koreksi0,00..... +

Jumlah penambahan (786.949.106,43)

Pengurangan Akumulasi penyusutan

Reklasifikasi (.....)

Koreksi (.....) +

Jumlah Pengurangan (694.383.845,43) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2018

Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan sebesar Rp.....0,00..... dengan rincian sebagai berikut:

-

-

- +

Total Koreksi Tambah ...0,00.....

Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan sebesar Rp...0,00... dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....) +	
Total Koreksi Kurang		(.....0,00.....)

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
4) Dana Cadangan	0,00	0,00
Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00		
	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
5) Aset Lainnya	6.580.000,00	6.580.000,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017(Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	0,00	0,00
(b)	Aset Lain-lain	6.580.000,00	6.580.000,00
	Jumlah Aset	6.580.000,00	6.580.000,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2018 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2017 (Rp0,00-Rp0,00)dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
(a) Aset Tak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 merupakan
(*ex : software/perangkat lunak*) dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 20180,00.....

Penambahan Aset Tak Berwujud

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Hibah

Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+
	<hr/>	
Jumlah penambahan		0,00
Pengurangan Aset Tak Berwujud		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....0,00.....)	+
	<hr/>	
Jumlah Pengurangan		(.....0,00.....) +
		<hr/>
Saldo Akhir Per 31 Desember 2018		0,00

Koreksi tambah Aset Tidak Berwujud sebesar Rp...0,00... dengan rincian sebagai berikut:

-	
-	
-	
-	
-	+
	<hr/>	
Total Koreksi Tambah	0,00.....
		<hr/>

Koreksi kurang Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....)	+
	<hr/>	
Total Koreksi Kurang		(.....0,00.....)
		<hr/>

	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2017</u> <u>(Rp)</u>
(b) Aset Lain-lain	6.580.000,00	6.580.000,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp 6.580.000,00, terdiri dari (Ex :Aset Tetap yang rusak sebesar Rp 0.00, Aset Tetap yang telah dihibahkan kepada masyarakat namun belum dihapusbukukan sebesar Rp 0,00) , dengan perincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2018 **6.580.000,00**

Penambahan Aset Lain-Lain

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi 0,00 +

Jumlah penambahan **0,00**

Pengurangan Aset Lain-lain

Penghapusan (.....)

Mutasi (.....)

Hibah (.....)

Reklasifikasi (.....)

Koreksi (.....) +

Jumlah Pengurangan **(.....0,00.....) +**

Saldo Akhir Per 31 Desember 2018 **6.580.000,00**

Koreksi tambah Aset Lain-lain sebesar Rp. 6.580.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

-
-
-
-
- +

Total Koreksi Tambah0,00.....

Koreksi kurang Aset Lain-lain sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (.....)

- (.....)

- (.....)

- (.....)

- (.....) +

Total Koreksi Kurang (.....0,00.....)

Rincian saldo aset lain-lain sebesar Rp0,00 sebagai berikut:

Nomor	Aset	Rusak	Hibah
1	<i>Misal:</i> Meubelair		
2			
3			
Jumlah		0,00	0,00

Untuk perolehan aset tetap melalui Belanja modal tahun 2018 terdapat aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan digolongkan dalam daftar aset dibawah batasan minimal kapitalisasi aset (Daftar Aset Ekstra Komptabel) dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Aset	Jumlah Unit	Rupiah
1	<i>Misal:</i> Meubelair		
2			
3			
Jumlah		0,00	0,00

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	(Rp)	(Rp)
b. Kewajiban	370.574,00	967.568,00

Saldo Kewajiban Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.370.574,00 dengan rincian sebagai berikut

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	(Rp)	(Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	370.574,00	967.568,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.967.568,00 dan 31 Desember 2018

sebesar Rp.370.574,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Utang Beban	370.574,00
(b)	0,00
(c)	0,00
Jumlah Hutang		370.574,00

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2018 sebesar NIHIL

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
c. Ekuitas Dana	516.644.218,57	573.051.979,57

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD sebesar Rp.1.791.716.590,00

2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
a. Pendapatan	0,00	0,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Anggaran dan Realisasi dalam Tahun Anggaran 2018 serta Realisasi Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut.

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2018	2017
(1)	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00
	- Pajak			
	- Retribusi ...		NIHIL	
(2)	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
b. Belanja	1.791.716.106,00	1.899.002.148,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2018 Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2018 sebagai berikut.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1) Belanja Operasi	1.775.167.590,00	1.860.002.148,00

Belanja Operasi Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2018 Rp.1.755.716.590,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2018	2017
(a)	Belanja Pegawai	1.455.724.150,00	1.439.918.084,00	1.535.306.289,00
	(1) Belanja Gaji dan Tunjangan	1.455.724.150,00	1.439.918.084,00	1.535.306.289,00
	(2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0,00	0,00	0,00
	(3) Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	319.118.956,00	315.798.506,00	324.695.895,00
	(1) Belanja Bahan Habis Pakai	43.088.500,00	43.066.000,00	29.370.500,00
	(2) Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
	(3) Belanja Jasa Kantor	63.275.456,00	62.312.806,00	48.354.259,00
	(4) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.450.000,00	8.625.100,00	22.115.600,00
	(5) Belanja Cetak dan Penggandaan	8.170.000,00	8.169.600,00	4.606.000,00
	(6) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par kir	0,00	0,00	0,00
	(7) Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
	(8) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.250.000,00	10.250.000,00	24.950.000,00
	(9) Belanja Makanan dan Minuman	47.600.000,00	47.600.000,00	43.980.000,00
	(10) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00
	(11) Belanja Pakaian Khusus	0,00	0,00	0,00

	dan hari-hari tertentu			
	(12) Belanja Perjalanan Dinas	75.225.000,00	73.715.000,00	99.224.500,00
	(13) Belanja Pemeliharaan	8.950.000,00	8.950.000,00	8.835.000,00
	(14) Belanja Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00
	(15) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	(16) Belanja Honorarium PNS	38.610.000,00	38.610.000,00	35.760.000,00
	(17) Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	0,00
(c)	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
	(1) Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.774.843.106,00	1.755.716.590,00	1.860.002.148,00

31 Desember 2018
(Rp)

31 Desember 2017
(Rp)

2) Belanja Modal

36.000.000,00

39.000.000,00

Belanja Modal Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2018 Rp.36.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2018(Rp)	Realisasi (Rp)	
			2018	2017
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 1	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin			
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00

No	Belanja Modal	Anggaran 2018(Rp)	Realisasi (Rp)	
			2018	2017
	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	11.150.000,00	11.150.000,00	21.500.000,00
	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	13.850.000,00	13.850.000,00	6.250.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Aloat Rumah Tangga lainnya (Home Use)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat pejabat	0,00	0,00	9.750.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 2	0,00	0,00	0,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 3	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 4	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (5)	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Modal	36.000.000,00	36.000.000,00	39.000.000,00

Jumlah tersebut termasuk:

- Realisasi Belanja Modal Rp.36.000.00,00 berasal dari Belanja yang terdiri dari (*Ex : Belanja Peralatan dan Mesin Rp.36.000.000,00 dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00*);
- Realisasi Belanja Modal Rp.36.00.000,00 berasal dari Belanja yang terdiri dari (*Ex :Belanja Peralatan dan Mesin Rp.36.000.000,00 dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 yang seharusnya dibebankan pada Belanja Hibah/ Belanja Barang dan Jasa*).

3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2018 yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/ Defisit Operasional.

	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
a. Pendapatan LO	0,00	0,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp..0,00... lebih besar Rp...0,00.. atau ..0,00..% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp...0,00.. dengan rincian sebagai berikut

No	Pendapatan Daerah	2018 (Rp)	2017(Rp)
(1)	Pendapatan Asli Daerah - LO	0,00	0,00
	- Pendapatan Pajak - LO		
	- Pendapatan Retribusi - LO		
	-		
(2)	Pendapatan Transfer - LO	0,00	0,00
	-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	NIHIL	
	-		
(3)	Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	0,00	0,00
	-Pendapatan Hibah - LO		
	-		
	Jumlah	0,00	0,00

Terdapat selisih antara Pendapatan LRA dengan Pendapatan LO yaitu sebesar Rp...0,00.. (Rp 0,00... - Rp0,00), perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan – LRA **Rp.0,00...**

Penambahan:

1. Piutang Murni (2018) Rp
2. Pendapatan Hibah – LO Rp
3. Koreksi Kurang Catat Rp
Pendapatan - LO

Jumlah Penambahan Rp.0,00.....

Pengurangan:

4. Setoran Piutang tahun
sebelumnya (Rp)

5. Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)

6. Koreksi Lebih Catat
Pendapatan - LO (Rp)

Jumlah Pengurangan (Rp.0,00.....)

Pendapatan - LO Rp.0,00.....

1. Piutang Murni (2018) sebesar Rp terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Daerah Rp.
- b. Pendapatan Retribusi Daerah Rp.
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp.
- d. Lain-lain PAD Yang Sah Rp.

JUMLAH Rp.0,00.....

2. Pendapatan Hibah – LO sebesar Rp Terdiri dari:

- a. Rp.
- b. Rp.
- c. Rp.
- d. Rp.

JUMLAH Rp.0,00.....

3. Koreksi Kurang Catat Pendapatan – LO sebesar Rp..... Terdiri dari:

- a. Rp.
- b. Rp.
- c. Rp.
- d. Rp.

JUMLAH Rp.0,00.....

4. Setoran Piutang tahun sebelumnya sebesar Rp..... Terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Daerah Rp.
- b. Pendapatan Retribusi Daerah Rp.
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp.
- d. Lain-lain PAD Yang Sah Rp.

JUMLAH Rp.0,00.....

5. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp..... terdiri dari:

- a. Sewa Gedung Serba Guna Rp.
- b. Sewa Tanah dan Bangunan Rp.

JUMLAH Rp. 0,00.....

6. Koreksi Lebih Catat Pendapatan – LO sebesar Rp..... terdiri dari:

- a. Rp.
 b. Rp.
 c. Rp.
 d. Rp.

JUMLAH

Rp. ...0,00.....

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
b. Beban	1.847.960.357,00	1.945.481.545,00

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.847.960.357,00 lebih Kecil Rp.(97.521.188,00) atau (5,01) % jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp.1.945.481.545,00,dengan rincian sebagai berikut.

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.439.918.084,00 lebih Besar Rp.(95.388.205,00) atau (6,21) % jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp.1.535.306.289,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Pegawai - LO	Saldo (Tahun 2018)	Saldo (Tahun 2017)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.439.918.084,00	1.535.306.289,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	0,00	0,00
3.	Beban Penerimaan Lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH dan WKDH - LO	0,00	0,00
4.	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan – LO	0,00	0,00
5.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00
6.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00
7.	Uang Lembur - LO	0,00	0,00
Jumlah Total		1.439.918.084,00	1.535.306.289,00

Beban Pegawai pada LO sebesar Rp. 1.439.918.084,00 sama dengan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp. 1.439.918.084,00.

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.315.477.012,00 lebih besar Rp.(9.540.483,00) atau (2,94) % jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp.325.017.495,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Barang dan Jasa - LO	Saldo (Tahun 2018)	Saldo (Tahun 2017)
1.	Beban Bahan Pakai Habis	315.477.012,00	325.017.495,00
2.	Beban Persediaan Bahan/ Material	0,00	0,00
3.	Beban Jasa Kantor	0,00	0,00
4.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00

5.	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00
6.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00
7.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00
8.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00
9.	Beban Makanan dan Minuman	0,00	0,00
10.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00
11.	Beban Pakaian Kerja	0,00	0,00
12.	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00
13.	Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00
14.	Beban Pemeliharaan	0,00	0,00
15.	Beban Jasa Konsultasi	0,00	0,00
16.	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00
17.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00
18.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00
19.	Beban Honorarium PNS - LO	0,00	0,00
20.	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00
21.	Beban Honorarium Pengelola BLUD	0,00	0,00
22.	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
Jumlah Total		315.477.012,00	325.017.495,00

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama.

Total Nilai Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 315.477.012,00 tidak sama dengan Belanja Barang dan Jasa di LRA sebesar Rp 315.798.506,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp(321.494,00) (Rp 315.477.012,00 – Rp 315.798.506,00). Hal ini dikarenakan timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan penurunan umur manfaat atau potensi jasa, dan lain-lain. Selisih sebesar Rp (321.494,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa – LRA

Rp.315.798.506,00

Penambahan

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Beban dari Persediaan Awal (1 Januari 2017) Barang dan Jasa | Rp.825.500,00 |
| 2 | Utang Beban Barang Jasa | Rp.370.574,00 |
| 3 | Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal | Rp. |
| 4 | Beban dibayar dimuka (beban sewa rumah jabatan/dinas) | Rp. |
| 5 | Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Hibah | Rp. |
| 6 | Koreksi Kurang Catat Utang Beban Barang dan Jasa | Rp. |

Jumlah Penambahan

Rp.1.196.074,00

Pengurangan

- | | | |
|---|--|----------------|
| 7 | Beban dari Persediaan Akhir (31 Desember 2017) Barang dan Jasa | Rp(986.000,00) |
| 8 | Pembayaran Utang Beban Barang dan Jasa 2017 | Rp(967.568,00) |
| 9 | Pengakuan Aset dari Belanja Barang dan Jasa | Rp(.....) |

10 Koreksi Lebih Catat Utang	Rp(433.000,00)	
Beban Barang dan Jasa		
Jumlah Pengurangan		Rp(2.386.568,00)
Beban Barang dan Jasa – LO		Rp315.477.012,00

1. Beban dari Persediaan Awal sebesar Rp. 825.500,00 berasal dari:

a. Beban Bahan Pakai Habis	Rp . 315.798.506,00
b. Beban Persediaan Bahan/ Material	Rp
c. Beban Cetak dan Penggandaan	Rp
d. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp
e. Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Rp
f. Beban Barang Yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	Rp
JUMLAH	Rp. 315.798.506,00

2. Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.370.74,00 merupakan kewajiban yang timbul pada bulan Desember 2017 dan masih harus dibayar pada bulan Januari 2018 yang nantinya akan berpengaruh pada Beban Jasa Kantor diantaranya:

a. Utang Beban Telepon	Rp 312.051,00
b. Utang Beban Air	Rp 58.532,00
c. Utang Beban Listrik	Rp
d. Utang Beban Surat Kabar/ Majalah	Rp
e. Utang Beban Faximili, Internet	Rp
f. Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp
g. Utang Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp
JUMLAH	Rp 370.74,00

3. Sedangkan Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal sebesar Rp.....0,00..... dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Beban Bahan Habis Pakai	Rp
- Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp
- dst	Rp
b. Beban Persediaan Bahan Material	Rp
- Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	Rp
- dst	Rp
c. Dst	Rp
- dst	Rp
JUMLAH	Rp0,00...

4. Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp.....0,00... merupakan beban sewa rumah jabatan/ dinas yang ada pada Bagian Umum dengan rincian sebagai berikut.

c.	Utang Beban Listrik	Rp 357.038,00
d.	Utang Beban Surat Kabar/ Majalah	Rp
e.	Utang Beban Faximili, Internet	Rp
f.	Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp
g.	Utang Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp
JUMLAH		Rp 967.568,00

9. Pengakuan Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.....0,00.... dapat dijelaskan sebagai berikut.

a.	Beban Bahan Habis Pakai	Rp
	- Beban alat listrik	Rp
	- dst	Rp
b.	Beban Persediaan Bahan Material	Rp
	- Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	Rp
	- dst	Rp
c.	Dst	Rp
	- dst	Rp
JUMLAH		Rp...0,00.....

10. Koreksi Lebih Catat pembebanan Utang Beban Barang dan Jasa tahun 2017 sebesar Rp...0,00.. antara lain terdiri dari:

a.	Utang Beban Telepon	
	- Data Utang Beban Telepon awal	Rp
	- Pembayaran Utang Beban Telepon	Rp (.....)
	Lebih Catat Saldo Awal Beban Telepon	Rp
b.	Utang Beban Air	
	- Data Utang Beban Air Awal	Rp
	- Pembayaran Utang Beban Air	Rp (.....)
	Lebih Catat Saldo Awal Beban Air	Rp ...0,00.....
JUMLAH		Rp0,00...

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan saldo Beban Hibah periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp..0,00. lebih besar Rp..0,00. atau ..0,00.% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp.0,00..dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Hibah - LO	Saldo (Tahun 2018)	Saldo (Tahun 2017)
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah	0,00	0,00
2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3.	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	0,00	0,00

4.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
5.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan saldo Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2017 ,sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp..0,00... lebih besar Rp...0,00... atau 0,00..% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp.0,00..dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Bantuan Sosial	Saldo (Tahun 2018)	Saldo (Tahun 2017)
1.	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00
2.	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00

5) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan sebelum Tahun Anggaran 2018, sedangkan belanja modal tahun 2017 telah dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2016.

Saldo beban penyusutan periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.92.565.261,00 lebih besar Rp.7.407.500,00 atau 8,70% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp.85.157.761,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Penyusutan	Saldo (Tahun 2018)	Saldo (Tahun 2017)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	85.022.617,00	77.615.117,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.823.200,00	6.823.200,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	719.444,00	719.444,00
Jumlah Total		92.565.261,00	85.157.761,00

6) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp..0,00.. lebih besar Rp..0,00... atau .0,00..% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp..0,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Penyisihan Piutang	Saldo (Tahun 2018)	Saldo (Tahun 2017)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	0,00
2.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00

7) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan Beban Lain-lain periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp..0,00.... lebih besar Rp..0,00... atau ..0,00..% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp..0,00... dengan rincian sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Lain-lain	Saldo (Tahun 2018)	Saldo (Tahun 2017)
1.	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00
2.	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
3.	Beban Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Total		0,00	0,00

c. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.(1.847.960.357,00) lebih Kecil Rp.97.521.188,00 atau (5,01) % jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp.(1.945.481.545,00).

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2018 sebesar Rp0,00 merupakan Kegiatan Non Operasional. sedangkan saldo tahun 2017 sebesar Rp0,00 merupakan .0,00

e. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2018sebesar Rp. (1.847.960.357,00) sedangkan saldo tahun 2017 sebesar Rp .(1.945.481.545,00).

4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Rincian Laporan Perubahan Ekuitas	Tahun 2018	Tahun 2017
1.	Saldo Ekuitas Awal	572.084.411,57,	618.608.808,57
2.	Surplus/defisit – LO	(1.847.960.357,00)	(1.945.481.545,00)
3.	Koreksi Ekuitas	433.000,00	(45.000,00)
4.	Ekuitas akhir	516.273.644,57	572.084.411,57

Koreksi Ekuitas sebesar Rp.433.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Tambah Ekuitas :

-	Mencatat Koreksi Lebih Catat utang Beban Tahun 2017 No.002/JU.1/4.1.5.18/2018	433.000,00
-	
-	
- +	
	Total Koreksi Tambah	433.000,00

Koreksi Kurang Ekuitas :

-	(.....)
---	---------

-	(.....)	
-	(.....)	
-	(.....) +	
Total Koreksi Kurang		(.....0,00.....) +
Total Koreksi Ekuitas		433.000,00

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN

Selama tahun 2018 pada Kantor Kecamatan Udanawu terjadi hal-hal penting yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan ini, sebagai berikut.

1. Penggantian manajemen pemerintah selama tahun berjalan;
2. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
3. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca;
4. **Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan;** dan
5. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Blitar, 31 Desember 2018
Kepala Kantor Kecamatan Udanawu
Kabupaten Blitar

SAMSUL MA'ARIF,SH,Msi
Pembina Tk.I
NIP : 19610710 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

SKPD

Jalan Telp.

B L I T A R

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

No.....

Pada hari ini tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu TujuhBelas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.59 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Bendahara Pengeluaran/Penerimaan

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar **Nomor tanggal** ditugaskan mengurus uang, berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti – bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas	=	Rp.
b. Uang logam	=	Rp.
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan	=	Rp.
d. Saldo Bank	=	Rp.
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	=	Rp.
Jumlah	=	Rp.

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan lain sebagainya berjumlah	=	Rp.
---	---	-----

Perbedaan Positif/Negatif antar Saldo Kas dan Saldo buku	=	Rp.
Penjelasan Perbedaan positif/negatif :	

Blitar, 31 Desember 2018

Yang diperiksa,
 Bendahara Pengeluaran/penerimaan

Yang memeriksa,
 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

NAMA LENGKAP
 NIP.

NAMA LENGKAP
 NIP.

Foto Copy Rekening Koran



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SKPD
 JalanTelp.
BLITAR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PERSEDIAAN BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Pengguna Barang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.59 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

Berdasarkan **Keputusan Bupati Blitar Nomor tanggal** ditugaskan mengurus barang, berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti – bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami mendapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2018:

No	Nama Persediaan	Nilai (Rp.)
1.	Persediaan Bahan Pakai Habis	Rp.
2.	Persediaan Bahan Material	Rp.
3.	Persediaan Barang Lainnya	Rp.
Jumlah		Rp.

Rincian hasil pemeriksaan fisik persediaan terlampir.

Yang diperiksa,
 Pengurus Barang

Blitar, 31 Desember 2018
 Yang memeriksa,
 Pengguna Barang

NAMA LENGKAP

NIP.

NAMA LENGKAP

NIP.

Lampiran: Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan

SKPD :

DAFTAR PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2018

Kode Akun Keuangan		Nama Persediaan	Saldo
Beban	Persediaan		
9.1.02.01	1.1.7.01	Persediaan Bahan Habis Pakai	-
9.1.02.01.01	1.1.7.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	-
9.1.02.01.02	1.1.7.01.02	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-
9.1.02.01.03	1.1.7.01.03	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	-
9.1.02.01.04	1.1.7.01.04	Persediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	-
9.1.02.01.05	1.1.7.01.05	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-
9.1.02.01.06	1.1.7.01.06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	-
9.1.02.01.07	1.1.7.01.07	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-
9.1.02.01.08	1.1.7.01.08	Persediaan Isi Tabung Gas	-
9.1.02.01.09	1.1.7.01.09	Persediaan Isi Tabung Oksigen	-
9.1.02.01.10	1.1.7.01.10	Persediaan Alat Kesehatan/Alat Lab. Habis Pakai	-
9.1.02.01.11	1.1.7.01.11	Persediaan Cenderamata/Piagam/Karangan Bunga	-
9.1.02.01.12	1.1.7.01.12	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	-
9.1.02.06.01	1.1.7.01.13	Persediaan Bahan Cetak	-
9.1.02.02	1.1.7.02	Persediaan Bahan/Material	-
9.1.02.02.01	1.1.7.02.01	Persediaan Bahan Baku Bangunan	-
9.1.02.02.02	1.1.7.02.02	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	-
9.1.02.02.03	1.1.7.02.03	Persediaan Bibit Ternak	-
9.1.02.02.04	1.1.7.02.04	Persediaan Bahan Obat-obatan	-
9.1.02.02.05	1.1.7.02.05	Persediaan Bahan Kimia	-
9.1.02.02.06	1.1.7.02.06	Persediaan Bahan Makanan Pokok	-
9.1.02.02.07	1.1.7.02.07	Persediaan Bahan Peralatan	-
9.1.02.02.08	1.1.7.02.08	Persediaan Bahan Sembako	-
9.1.02.02.09	1.1.7.02.09	Persediaan Bahan Pakan Hewan	-
9.1.02.02.10	1.1.7.02.10	Persediaan Bahan Pupuk Tanaman	-

Kode Akun Keuangan		Nama Persediaan	Saldo
Beban	Persediaan		
9.1.02.02.11	1.1.7.02.11	Persediaan Bahan Praktek/Pelatihan	-
9.1.02.12	1.1.7.02.12	Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya	-
9.1.02.12.01	1.1.7.02.12.01	<i>Persediaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH</i>	
9.1.02.12.02	1.1.7.02.12.02	<i>Persediaan Pakaian Sipil Harian (PSH)</i>	
9.1.02.12.03	1.1.7.02.12.03	<i>Persediaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)</i>	
9.1.02.12.04	1.1.7.02.12.04	<i>Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)</i>	
9.1.02.12.05	1.1.7.02.12.05	<i>Persediaan Pakaian Dinas Upacara (PDU)</i>	
9.1.02.12.06	1.1.7.02.12.06	<i>Persediaan Pakaian Dinas Pimpinan & Anggota Dewan</i>	
9.1.02.13	1.1.7.02.13	Persediaan Pakaian Kerja	-
9.1.02.13.01	1.1.7.02.13.01	<i>Persediaan Pakaian Kerja Lapangan</i>	
9.1.02.14	1.1.7.02.14	Persediaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-
9.1.02.14.01	1.1.7.02.14.01	<i>Persediaan Pakaian KORPRI</i>	
9.1.02.14.02	1.1.7.02.14.02	<i>Persediaan Pakaian Adat Daerah</i>	
9.1.02.14.03	1.1.7.02.14.03	<i>Persediaan Pakaian Batik Tradisional</i>	
9.1.02.14.04	1.1.7.02.14.04	<i>Persediaan Pakaian Olahraga</i>	
9.1.02.14.05	1.1.7.02.14.05	<i>Persediaan Pakaian Rapat Paripurna</i>	
9.1.02.20	1.1.7.03	Persediaan Barang Lainnya	-
9.1.02.20.01	1.1.7.03.01	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	-
JUMLAH			-

Blitar, 31 Desember 2018

Yang diperiksa,
Bendahara Barang

Yang memeriksa,
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna barang

NAMA LENGKAP

NIP.

NAMA LENGKAP

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

SKPD

Jalan Telp.

B L I T A R

DAFTAR INVENTARISASI PIUTANG DAERAH
Per 31 Desember 2018

No	Piutang					Perhitungan		
	Jenis	Umur (Tahun)	Saldo Per 31 Desember 2017	Setoran 2018 1 Jan s/d 31 Des 2018	Saldo Per 31 Desember 2018 (Perhitungan Fisik)	Prosentase	Penyisihan Piutang yang tidak tertagih	Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=6x7	9=6-8
1	Piutang Retribusi							

*) *Diisi sesuai keadaan yang ada dimasing-masing SKPD/ hilangkan item yang tidak ada*

PPK SKPD

Blitar, 31 Desember 2018
mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

NAMA LENGKAP
NIP.

NAMA LENGKAP
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SKPD
 Jalan Telp.
BLITAR

DAFTAR INVENTARISASI ASSET PEROLEHAN TAHUN 2018 dan ASSET EKSTRAKOMPTABEL PEROLEHAN TAHUN 2018
Per 31 Desember 2018

No	Program/Kegiatan	Aset		Belanja				Keterangan (Aset Tetap/Ekstrakomtabel)
		Jenis	Jumlah Unit	Belanja Pegawai (Rp.)	Belanja Barang dan Jasa (Rp.)	Belanja Modal (Rp.)	Total (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9
1	<i>Contoh:</i> Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Komputer	2	-	-	15.000.000	15.000.000	Aset Tetap
		Kursi Rapat	50			5.000.000	5.000.000	Aset Ekstrakomtabel Nominal Per Unit Dibawah Batasan Kapitalisasi Aset
	Jumlah		52	-	-	20.000.000	20.000.000	

Blitar, 31 Desember 2018

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

PPK SKPD

NAMA LENGKAP
NIP.

NAMA LENGKAP
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SKPD
 Jalan Telp.
BLITAR

DAFTAR BEBAN TAHUN 2018 YANG BELUM DIBAYAR
Sampai dengan 31 Desember 2018

No	Kode Rekening Belanja	Uraian	Kewajiban/Hutang		Keterangan
			Periode	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	9
	<i>Contoh 5.2.2.3.1</i>	Belanja Telepon	Desember	1.000.000,-	Tagihan Telepon Bulan Desember 2018 yang belum dibayar
	<i>Contoh 5.2.2.3.2</i>	Belanja Air	Desember	1.000.000,-	Tagihan Air Bulan Desember 2018 yang belum dibayar
	<i>Contoh 5.2.2.3.3</i>	Belanja Listrik	Desember	1.000.000,-	Tagihan Listrik Bulan Desember 2018 yang belum dibayar
	<i>Contoh 5.2.2.3.5</i>	Belanja Surat kabar/majalah	Desember	1.000.000,-	Tagihan Surat kabar Bulan Desember 2018 yang belum dibayar
	<i>Contoh 5.2.2.3.6</i>	Belanja Faximili/internet	Desember	1.000.000,-	Tagihan internet Bulan Desember 2018 yang belum dibayar
JUMLAH				5.000.000,00	

PPK SKPD

NAMA LENGKAP
NIP.

Blitar, 31 Desember 2018
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

NAMA LENGKAP
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SKPD
 Jalan Telp.
BLITAR

DAFTAR PENDAPATAN YANG DITERIMA DIMUKA
Sampai dengan 31 Desember 2018

No	Kode Rekening Pendapatan	Uraian	Surat Tanda Setoran (STS)		Pendapatan Diterima Dimuka
			Tanggal	Nomor	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					0,00

PPK SKPD

NAMA LENGKAP
NIP.

Blitar, 31 Desember 2018
Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

NAMA LENGKAP
NIP.

Lampiran Inventarisasi Aset Daerah Perolehan TA 2018

Daftar Inventarisasi Aset Daerah Extra Komptabel Perolehan 2018

Rekap Perhitungan Penyusutan per 31 Desember 2018

(MINTA PAK ENDRO BIDANG ASET)

Rekap Perhitungan Akumulasi per 31 Desember 2018

(MINTA PAK ENDRO BIDANG ASET)

RINCIAN BARANG KE NERACA

(Print Out Simbada)

LAPORAN - AKUNTANSI – RINCIAN BARANG KE NERACA

(CONTOH: DINAS PENDIDIKAN)

Lampiran III c

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMD
BIDANG AKUNTANSI BPKAD
DINAS PENDIDIKAN
SEMESTER I TAHUN 2017

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua puluh empat** bulan **Agustus** tahun **2017**, bertempat di BPKAD, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I Nama : **SHUNIE JAZIELATIE, SE., MM.**
 NIP : 19790130 200604 2 013
 Jabatan : Kasubbag Keuangan
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran pada **Dinas Pendidikan**, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II Nama : **MOH. BADRODIN, SE., MM.**
 NIP : 19750902 200501 1 004
 Jabatan : Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BUD pada **BPKAD** , untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Aset Daerah Dengan cara membandingkan data Aset SKPD yang disusun oleh PPK-SKPD dan data Aset yang disusun oleh Bidang Akuntansi BPKAD untuk periode **SEMESTER I**, dengan hasil sebagai berikut:

I Hasil Rekonsiliasi Data

No	Akun Neraca	Nilai BMD Periode SEMESTER I		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
A	ASET TETAP	588.267.369.413,89	410.341.800,00	588.677.711.213,89
	1 Tanah	107.922.007.432,00	-	107.922.007.432,00
	2 Peralatan dan Mesin	56.177.158.233,22	-	56.177.158.233,22
	3 Gedung dan Bangunan	398.284.040.689,78	410.341.800,00	398.694.382.489,78
	4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.943.000,00	-	94.943.000,00
	5 Aset Tetap Lainnya	25.789.220.058,89	-	25.789.220.058,89
B	ASET LAINNYA	105.448.306.791,28	-	105.448.306.791,28
	1 Aset Tidak Berwujud	-	-	-
	2 Aset Lain-lain	105.448.306.791,28	-	105.448.306.791,28
C	JUMLAH ASET TETAP	693.715.676.205,17	410.341.800,00	694.126.018.005,17
D	EKSTRAKOMPTABEL			-

Rincian terlampir :

- II Hal-hal penting lainnya mengenai data BMD terkait penyusunan disajikan dalam Lampiran Berita

Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah periode SEMESTER I dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS PENDIDIKAN

Pejabat Penatausahaan Keuangan

SHUNIE JAZIELATIE, SE., MM.

Penata

NIP. 19790130 200604 2 013

BIDANG AKUNTANSI

Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan

MOH. BADRODIN, SE., MM.

Penata Tingkat I

NIP. 19750902 200501 1 004

Mengetahui,

a.n. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Blitar
 (BPKAD Kabupaten Blitar)
 Kepala Bidang Akuntansi

ESY LASTINI, SE.

Penata Tingkat I

NIP. 19710114 199703 2 002

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMD
BIDANG AKUNTANSI BPKAD
DINAS PENDIDIKAN
SEMESTER I TAHUN 2016

I Rekonsiliasi Saldo Awal Data Aset

Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal Sebelum Koreksi	Koreksi		Saldo Awal setelah koreksi
			Tambah	Kurang	
1.3	ASET TETAP	150.754.554.903,58	-		150.754.554.903,58
1.3.1.11.02	Tanah Untuk Bangunan Gedu	10.715.000,00			10.715.000,00
1.3.1.11.04	Tanah Untuk Bangunan Temp	107.909.247.757,00			107.909.247.757,00
1.3.1.13.01	Tanah Lapangan Olah Raga	2.044.675,00			2.044.675,00
1.3.2.03.04	Electric Generating Set	59.350.000,00			59.350.000,00
1.3.2.03.05	Pompa	36.175.500,00			36.175.500,00
1.3.2.04.01	Kendaraan Dinas Bermotor Pe	289.580.000,00			289.580.000,00
1.3.2.04.05	Kendaraan Bermotor Beroda D	1.140.393.277,00			1.140.393.277,00
1.3.2.04.06	Kendaraan Bermotor Beroda T	22.613.800,00			22.613.800,00
1.3.2.05.02	Kendaraan Tak Bermotor Berp	270.320.000,00			270.320.000,00
1.3.2.09.01	Perkakas Konstruksi Logam T	121.481.035,00			121.481.035,00
1.3.2.09.03	Perkakas Bengkel Listrik	31.078.240,00			31.078.240,00
1.3.2.10.04	Perkakas Pengangkat	7.456.000,00			7.456.000,00
1.3.2.10.05	Perkakas Standar (Standart T	2,00			2,00
1.3.2.11.01	Alat Ukur Universal	7.783.880,00			7.783.880,00
1.3.2.11.08	Alat Ukur / Pembanding	250.000,00			250.000,00
1.3.2.11.09	Alat Ukur Lainnya	(1,00)			(1,00)
1.3.2.11.10	Alat Timbangan / Blora	10.137.499,00			10.137.499,00
1.3.2.12.07	Alat Pasca panen	14.279.000,00			14.279.000,00
1.3.2.12.08	Alat Produksi Perikanan	300.000,00			300.000,00
1.3.2.13.01	Alat Pemeliharaan Tanaman	3.645.000,00			3.645.000,00
1.3.2.13.02	Alat Panen	2.770.000,00			2.770.000,00
1.3.2.13.04	Alat Laboratorium	5,00			5,00
1.3.2.14.01	Alat Kantor Mesin Ketik	438.149.266,00			438.149.266,00
1.3.2.14.02	Alat Kantor Mesin Hitung/Jun	27.891.001,00			27.891.001,00
1.3.2.14.03	Alat Kantor Reproduksi/Pengg	36.920.000,00			36.920.000,00
1.3.2.14.04	Alat Penyimpanan Perlengkap	1.469.243.167,00			1.469.243.167,00
1.3.2.14.05	Alat Kantor Lainnya	1.008.081.158,00			1.008.081.158,00
1.3.2.15.01	Meubelair	26.905.747.025,96			26.905.747.025,96
1.3.2.15.02	Alat Pengukur Waktu	7.784.040,00			7.784.040,00
1.3.2.15.03	Alat Pembersih	73.330.000,00			73.330.000,00
1.3.2.15.04	Alat Pendingin	184.015.616,00			184.015.616,00
1.3.2.15.05	Alat Dapur	16.728.396,00			16.728.396,00
1.3.2.15.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (H	621.431.781,01			621.431.781,01
1.3.2.15.07	Alat Pemadam Kebakaran	1.500.000,00			1.500.000,00
1.3.2.16.02	Personal Komputer	2.388.966.849,00			2.388.966.849,00
1.3.2.16.03	Peralatan Komputer Mainfram	17.834.300,00			17.834.300,00
1.3.2.16.04	Peralatan Mini Komputer	1,00			1,00
1.3.2.16.05	Peralatan Personal komputer	1.528.018.989,00			1.528.018.989,00
1.3.2.16.06	Peralatan Jaringan	77.558.800,00			77.558.800,00
1.3.2.17.02	Meja Rapat Pejabat	1,00			1,00
1.3.2.18.01	Peralatan Studio Visual	938.856.431,00			938.856.431,00
1.3.2.18.02	Peralatan Studio Video dan Fil	8.350.000,00			8.350.000,00
1.3.2.19.01	Alat Komunikasi Telephone	88.985.650,00			88.985.650,00
1.3.2.19.03	Alat Komunikasi Radio HF / F	5.700.000,00			5.700.000,00
1.3.2.21.01	Alat Kedokteran Umum	58.638.188,00			58.638.188,00
1.3.2.21.02	Alat Kedokteran Gigi	10.105.734,00			10.105.734,00
1.3.2.21.03	Alat Kedokteran Keluarga Berd	4.016.600,00			4.016.600,00
1.3.2.21.04	Alat Kedokteran Mata	1.500.000,00			1.500.000,00
1.3.2.21.06	Alat Rotgen	30.000,00			30.000,00
1.3.2.21.07	Alat Farmasi	33.000,00			33.000,00
1.3.2.21.08	Alat Kedokteran Bedah	4.036.961,00			4.036.961,00
1.3.2.21.09	Alat Kesehatan Kebidanan dan	225.000,00			225.000,00
1.3.2.21.10	Alat Kedokteran Bagian penya	4.698.300,00			4.698.300,00
1.3.2.21.12	Alat Kesehatan Anak	2.635.000,00			2.635.000,00
1.3.2.21.13	Poliklinik Set	3.125.000,00			3.125.000,00
1.3.2.21.14	Penderita Catat Tubuh	850.000,00			850.000,00
1.3.2.21.16	Alat Kedokteran Jantung	190.000,00			190.000,00
1.3.2.21.18	Alat Kedokteran Radiologi	5.461.500,00			5.461.500,00
1.3.2.21.19	Alat Kedokteran Kulit dan Kela	130.000,00			130.000,00
1.3.2.22.01	Alat Kesehatan Perawatan	3.505.497,00			3.505.497,00
1.3.2.22.02	Alat Kesehatan Rehabilitasi M	8.010.000,00			8.010.000,00
1.3.2.22.03	Alat Kesehatan Matra Laut	98.782.000,00			98.782.000,00
1.3.2.22.04	Alat Kesehatan Matra Udara	25.940.000,00			25.940.000,00
1.3.2.22.06	Alat Kesehatan Olahraga	25.538.900,00			25.538.900,00
1.3.2.23.16	Alat Laboratorium Kimia	21.818.000,00			21.818.000,00
1.3.2.23.25	Alat Laboratorium Fisika	99.379.440,00			99.379.440,00
1.3.2.23.55	Alat Laboratorium Biologi	39.145.050,00			39.145.050,00
1.3.2.23.56	Alat Laboratorium Geofisika	16.347.000,00			16.347.000,00

1.3.2.24.02	Bidang Studi : Matematika	1,332,925,574.20		1,332,925,574.20
1.3.2.24.03	Bidang Studi : IPA Dasar	1,831,606,038.98		1,831,606,038.98
1.3.2.24.04	Bidang Studi : IPA Lanjutan	607,003,057.92		607,003,057.92
1.3.2.24.05	Bidang Studi : IPA Menengah	343,836,082.00		343,836,082.00
1.3.2.24.06	Bidang Studi : IPA Atas	30,236,908.57		30,236,908.57
1.3.2.24.07	Bidang Studi : IPS	212,724,560.98		212,724,560.98
1.3.2.24.08	Bidang Studi : Agama Islam	16,081,601.00		16,081,601.00
1.3.2.24.10	Bidang Studi : Kesenian	854,905,391.00		854,905,391.00
1.3.2.24.11	Bidang Studi : Olah Raga	7,436,219,081.00		7,436,219,081.00
1.3.2.24.12	Bidang Studi : PMP	126,900,390.00		126,900,390.00
1.3.2.24.13	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	4,842,449,599.64		4,842,449,599.64
1.3.2.25.01	Analytical Instrument	1,643,818.00		1,643,818.00
1.3.2.25.02	Instrument Probe/Sensor	520,000.00		520,000.00
1.3.2.25.03	General Laboratory Tool	25,000.00		25,000.00
1.3.2.25.05	Glassware Plastic/Utensils	8,939,318.00		8,939,318.00
1.3.2.25.06	Laboratory Safety Equipment	7,802,000.00		7,802,000.00
1.3.2.26.01	Radiation Detector	1,050,000.00		1,050,000.00
1.3.2.26.02	Modular Counting and Scintif	5,525,000.00		5,525,000.00
1.3.2.26.06	Measuring / Testing Device	1,350,000.00		1,350,000.00
1.3.2.26.07	Opto Electronics	6,484,000.00		6,484,000.00
1.3.2.27.02	Alat Kesehatan Kerja	6,220,000.00		6,220,000.00
1.3.2.27.04	Meteorological Equipment	1,607,562.00		1,607,562.00
1.3.2.28.03	Peralatan Umum Kedokteran/	2,708,000.00		2,708,000.00
1.3.2.29.01	Alat Laboratorium Kualitas Air	320,000.00		320,000.00
1.3.2.29.02	Alat Laboratorium Kualitas Ud	750,001.00		750,001.00
1.3.2.29.03	Alat Laboratorium Kebisingan	18,560,000.00		18,560,000.00
1.3.2.32.01	Alat Keamanan	4,500,000.00		4,500,000.00
1.3.2.32.02	Non Senjata Api	50,000.00		50,000.00
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Kantor	17,318,351,954.50		17,318,351,954.50
1.3.3.01.02	Bangunan Gudang	817,799,227.00		817,799,227.00
1.3.3.01.03	Bangunan Gudang Untuk Ben	3,651,281,975.21		3,651,281,975.21
1.3.3.01.04	Bangunan Gedung Instalasi	30,351,701.00		30,351,701.00
1.3.3.01.05	Bangunan Gedung Laboratori	13,421,108,321.63		13,421,108,321.63
1.3.3.01.06	Bangunan Kesehatan	20,000,000.00		20,000,000.00
1.3.3.01.08	Bangunan Gedung Tempat Iba	2,311,906,202.00		2,311,906,202.00
1.3.3.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pe	1,051,989,206.90		1,051,989,206.90
1.3.3.01.10	Bangunan Gedung Tempat Pe	357,258,803,798.00		357,258,803,798.00
1.3.3.01.11	Bangunan Gedung Tempat Ol	355,794,500.00		355,794,500.00
1.3.3.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/	161,400,279.00		161,400,279.00
1.3.3.01.13	Bangunan Gedung Untuk Pos	373,951,251.00		373,951,251.00
1.3.3.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Poc	177,300,000.00		177,300,000.00
1.3.3.01.19	Bangunan Gedung Perpustaka	1,098,476,823.00		1,098,476,823.00
1.3.3.01.27	Bangunan Gedung Tempat Ke	235,525,449.54		235,525,449.54
1.3.3.08.01	Tugu/Tanda Batas	1.00		1.00
1.3.4.08.02	Bangunan Pengambilan Air Be	750,000.00		750,000.00
1.3.4.08.05	Bangunan Pelengkap Air Bersi	22,200,000.00		22,200,000.00
1.3.4.11.02	Air Sumber/Mata Air	1,500,000.00		1,500,000.00
1.3.4.11.05	Air Bersih/ Air Baku Lainnya	400,000.00		400,000.00
1.3.4.21.01	Jaringan Transimisi	18,890,000.00		18,890,000.00
1.3.4.21.02	Jaringan Distribusi	49,123,000.00		49,123,000.00
1.3.4.22.01	Jaringan Telepon Di Atas Tan	2,080,000.00		2,080,000.00
1.3.5.01.01	Umum	10,704,879,775.24		10,704,879,775.24
1.3.5.01.02	Filsafat	118,421,446.35		118,421,446.35
1.3.5.01.03	Agama	666,067,072.12		666,067,072.12
1.3.5.01.04	Ilmu Sosial	5,114,628,743.31		5,114,628,743.31
1.3.5.01.05	Ilmu Bahasa	1,759,482,369.31		1,759,482,369.31
1.3.5.01.06	Matematika & Pengetahuan a	3,127,203,531.58		3,127,203,531.58
1.3.5.01.07	Ilmu Pengetahuan Praktis	3,567,856,961.50		3,567,856,961.50
1.3.5.01.08	Arsitektur, Kesenian, Olah ra	76,829,957.00		76,829,957.00
1.3.5.01.09	Geografi, Biografi, Sejarah	241,904,344.48		241,904,344.48
1.3.5.02.01	Terbitan Berkala	15,414,400.00		15,414,400.00
1.3.5.02.02	Buku Laporan	26,086,850.00		26,086,850.00
1.3.5.03.01	Peta	20,536,364.00		20,536,364.00
1.3.5.03.02	Naskah (Manuskrip)	23,328,000.00		23,328,000.00
1.3.5.03.03	Musik	2,013,005.00		2,013,005.00
1.3.5.04.01	Pahatan	2,950,000.00		2,950,000.00
1.3.5.04.02	Lukisan	10,072,500.00		10,072,500.00

1.3.5.04.02	Lukisan	10,072,500.00			10,072,500.00
1.3.5.04.03	Alat Kesenian	228,748,030.00			228,748,030.00
1.3.5.04.04	Alat Olah Raga	72.00			72.00
1.3.5.04.06	Maket dan Foto Dokumen	3.00			3.00
1.3.5.04.08	Barang Kerajinan	5,795,600.00			5,795,600.00
1.3.5.05.01	Senam	73,331,034.00			73,331,034.00
1.3.5.07.02	Tanaman Holtikultura	3,670,000.00			3,670,000.00
1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan -	1,592,411,096.00			1,592,411,096.00
1.5	ASET LAINNYA	105,448,306,791.28		-	105,448,306,791.28
1.5.4	Aset Lain-lain	105,448,306,791.28			105,448,306,791.28
	EKSTRAKOMPTABEL				-

Total nilai koreksi saldo awal sebesar Rp0,00

- a. Koreksi tambah catat sebesar Rp0,00
- b. Koreksi kurang catat sebesar Rp0,00

II Rekonsiliasi Aset Periode Berjalan

a Pemutakhiran Data Mutasi Aset dari Belanja Modal APBD

Kode Rekening	Nama Rekening	Mutasi		Keterangan
		Tambah	Kurang	
1.3	ASET TETAP	410,341,800.00	-	
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Kantor	410,341,800.00		Pembelian
1.5	ASET LAINNYA	-	-	
	EKSTRAKOMPTABEL			

b Pemutakhiran Data Mutasi Aset dari Belanja Pegawai APBD

Kode Rekening	Nama Rekening	Mutasi		Keterangan/ Kegiatan
		Tambah	Kurang	
1.3	ASET TETAP	-	-	
1.5	ASET LAINNYA	-	-	
	EKSTRAKOMPTABEL			

c Pemutakhiran Data Aset Daerah dari Belanja Barang dan Jasa APBD

Kode Rekening	Nama Rekening	Mutasi		Keterangan/ Kegiatan
		Tambah	Kurang	
1.3	ASET TETAP	-	-	-
				-
				-
1.5	ASET LAINNYA	-	-	-
				-
				-
	EKSTRAKOMPTABEL			-

d Pemutakhiran Data Aset dari Transaksi Non Keuangan

1). Mutasi Tambah

Kode Rekening	Nama Rekening	Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai	Keterangan/ Kegiatan
1.3	ASET TETAP			-	
1.5	ASET LAINNYA			-	

	EKSTRAKOMPTABEL			

III Lampiran - Lampiran

- a Berita Acara Rekonsiliasi dengan Pengurus Barang SKPD Periode yang sama
- b Laporan Rincian Barang Ke Neraca Periode Rekonsiliasi (dari SIMBADA)
- c Daftar Aset Lainnya Periode Rekonsiliasi (dari SIMBADA)
- d Rincian Saldo Buku Besar Aset Tetap Periode Rekonsiliasi (dari Simbada)
- e Data-Data Lain yang diperlukan

DINAS PENDIDIKAN

Pejabat Penatausahaan Keuangan

SHUNIE JAZIELATIE, SE., MM.

Penata

NIP. 19790130 200604 2 013

BIDANG AKUNTANSI

Kasubbid Pembukuan dan
Pelaporan

MOH. BADRODIN, SE., MM.

Penata Tingkat I

NIP. 19750902 200501 1 004

HASIL REKONSILIASI REALISASI ANGGARAN SEMESTER II TA 2018
(CONTOH: KECAMATAN BAKUNG)

BERITA ACARA REKONSILIASI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2018

Pada hari *Selasa* tanggal *Dua Puluh Lima bulan Oktober* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MOH. BADRODIN, SE., MM.**
Jabatan : Kasubid Pembukuan dan Pelaporan BPKAD
Nama : **HERU SETYAWAN, S.Pd. SE.**
Jabatan : PPK - Kecamatan Bakung

Menyatakan bahwa :

- Laporan SPJ Fungsional yang dikirim SKPD setiap bulan kepada BPKAD selaku PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya akan dikonsolidasikan sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Jumlah realisasi belanja yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Triwulan III Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1174936728 sudah benar-benar dipertanggungjawabkan dan telah diverifikasi keabsahannya oleh pejabat yang berwenang di SKPD;
- Jika terjadi kesalahan/melakukan koreksi setelah LRA Triwulan III Tahun Anggaran 2016 dikirim ke DPRD Kabupaten Blitar dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta serta BPKAD Propinsi Jawa Timur, agar membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Inspektorat dengan mencantumkan alasan yang jelas.

A	URAIAN	SPJ FUNGSIONAL	LRA	SELISIH	KET
	Pendapatan	-	-	-	-
	Belanja	1,174,936,728.00	1,174,936,728.00	-	-
	Surplus/(Defisit)		(1,174,936,728.00)		

B	URAIAN	LRA	LO	SELISIH	KET
	Pendapatan/LO	-	-	-	-
	Belanja/Beban	1,174,936,728.00	1,258,925,510.00	(83,988,782.00)	<i>Pembayaran Utang Beban Barang Jasa 2015</i> (306,652.00) <i>Koreksi Belanja</i> - <i>Persediaan Awal</i> 224,000.00 <i>Utang Beban Pegawai</i> 90,471,434.00 <i>SPJ Panjar yang Belum Di- SP2Dkan</i> - <i>Belanja Modal</i> (6,400,000.00)
	Surplus/(Defisit)	(1,174,936,728.00)	(1,258,925,510.00)		

C	URAIAN	PER 31 DES 2016	PER 30 SEPTEMBER 2017	BELANJA MODAL S/D 30 SEPTEMBER 2017	SELISIH	KET
	Tanah	345,197,500.00	345,197,500.00	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	488,556,177.50	488,556,177.50	6,400,000.00	6,400,000.00	Reklasifikasi aset Generating Set ke aset ekstrakomptabel sebesar Rp6.400.000,00
	Gedung dan Bangunan	3,638,745,250.00	3,638,745,250.00	-	-	-
	Jalan, Irigasi dan	-	-	-	-	-

Jaringan						
Aset Tetap Lainnya	36,960,000.00	36,960,000.00	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4,509,458,927.50	4,509,458,927.50	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	-
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
Aset Lainnya	47,537,500.00	47,537,500.00	-	-	-	-
Jumlah	47,537,500.00	47,537,500.00	-	6,400,000.00	6,400,000.00	-

D	URAIAN	SPJ FUNGSIONAL	PENUTUPAN KAS	NERACA	KET.
	Kas	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	

E	CATATAN
-	Entry Pajak
-	Membuat Laporan Penutupan Kas Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan Kas Bulanan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk menjadikan perhatian.

PPK - Kecamatan Bakung

Kasubid Pembukuan dan Pelaporan BPKAD

HERU SETYAWAN, S.Pd. SE.

Penata Tk. I

NIP. 19700705 199303 1 011

Camat Bakung

Selaku Pengguna Anggaran

BAMBANG DWI PURWANTO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19760204 199612 1 001

MOH. BADRODIN, SE., MM.

Penata Tk. 1

NIP. 19750902 200501 1 004

Kepala BPKAD

Selaku PPKD

Mengetahui,

Drs. MAHADIN CU, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 199003 1 009

Lain-lain:

- Memo Jurnal Penyesuaian/koreksi

- Bukti Penyesuaian/koreksi